

## Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Robinson, SE., M.Si., Ak  
Nila Aprilia, SE., M.Si., Ak ✓

(Dosen Universitas Bengkulu)

### ABSTRACT

This Research is descriptive analysis that aim to know the level of participation, accountability and transparency implementation in financial governance. The data in this research is primary data that obtained by spreading the questionnaires to Local Government Budget Team and Budget Committee, 120 questionnaires were returned but only 98 can be processed.

The data were analyzed by frequency table in descriptive statistics and comparing the value of  $z$  calculation with the  $z$  table to take of conclusion. From frequency table in descriptive statistics obtained that the level of participation, accountability and transparency implementations in financial governance is 60,74; 63,96% and 59,4%. Where as by comparison obtained that the value of  $z$  calculation for participation, accountability and transparency is smaller than  $z$  table value. That is indicate the principles of participation, accountability and transparency is not fulfil enough in financial governance.

Keywords: *Good Governance, Participation, Accountability, Transparency, Financial Governance.*

### PENDAHULUAN

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia adalah bagaimana menciptakan sebuah tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. Tantangan tersebut muncul karena banyaknya persoalan nyata yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang belum dapat diselesaikan. Masalah pengangguran, kemiskinan, rendahnya mutu dan kesempatan memperoleh pendidikan, serta rendahnya tingkat kesehatan warga adalah beberapa contoh permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah (Sudi 2007).

Prinsip *good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), partisipasi, keadilan, dan kemandirian. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diharapkan sumber daya daerah yang dikelola oleh pemerintah benar-benar mencapai tujuan bersama, yakni untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Masmudi 2003).

Salah satu tahapan yang penting dan menentukan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan penganggaran (*budgeting*). Mardiasmo (2002), mengatakan bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah

pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Untuk menghasilkan anggaran yang berkualitas, maka dalam prosesnya juga harus menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi.

Namun pada kenyataannya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah masih kurang. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Eksekutif dan Legislatif boleh dikatakan tidak transparan dan akuntabel, karena APBD yang sudah disusun tersebut tidak pernah dipublikasikan kepada publik. Demikian pula halnya dengan pertanggungjawaban APBD tersebut juga tidak pernah dipublikasikan. Inilah salah satu wujud nyata dari kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran tersebut (APKASI 2001) (<http://www.apkasi.or.id>)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang tingkat implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan, evaluasi dan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Adapaun rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat implementasi prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimanakah tingkat implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah?
3. Bagaimanakah tingkat implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah?

## KAJIAN PUSTAKA

### Prinsip-Prinsip *Good Governance*

*Good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama (efisien) dan (relatif) merata (Krina 2003). Sedangkan (Pujiyono 2006) menyatakan bahwa konsep *good governance* dimaknai sebagai pengelolaan atau pengarahannya yang baik untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

#### 1. Akuntabilitas

Dalam *Governmental Accounting Standard Board (GASB) bagian Concepts Statements no.1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban

pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Halim 2002).

Menurut Krina (2003), akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisiensi dari para aparat birokrasi.

## **2. Transparansi**

Menurut Werimon, dkk (2007) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan menurut Krina (2003) prinsip transparansi di atas dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

## **3. Partisipasi**

Partisipasi bermaksud untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi: pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pemba-ngunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)).

Partisipasi didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintah akan bekerja lebih baik jika anggota-anggota dalam struktur diberi kesempatan untuk terlibat secara intim dengan setiap keputusan organisasi. Hal ini menyangkut dua aspek, yaitu (B. Guy Peter 2001 dalam Krina 2003):

- a. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen di antara para aparat agar termotivasi dengan kuat pada program yang diimplementasikan.
- b. Keterlibatan publik, dalam desain dan implementasi program.

## **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk mengelola keuangan daerah secara terintegrasi, efektif, dan efisien perlu dilaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mempunyai

tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam BPKD DIY, 2008)

Pengelolaan keuangan daerah adalah pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkenaan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkenaan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah ( Halim 2004:9, 21).

Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek (Halim 2004:68) berikut:

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Transparansi menjadi salah satu ukuran penting dari *good governance*. *Governance* dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi di dalam pemerintahannya. Selain itu, transparansi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kemampuan pemerintah untuk mewujudkan berbagai indikator *governance* yang lain. Misalnya, bagaimana pemerintah dapat menjadikan dirinya partisipatif jika mereka tidak sanggup mewujudkan transparansi. Warga hanya akan mau dan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan jika aturan main mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik itu terbuka dan mudah diketahui oleh warga. Kalau informasi mengenai hak dan kewajiban tidak jelas dan sulit diketahui oleh warga maka tidak akan ada partisipasi (Dwiyanto 2006:227).

Dengan mengacu pada tujuan dari akuntansi pemerintahan dan mengharapkan diterapkannya *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah, maka sangatlah penting untuk mengimplementasikan transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu diharapkan implementasi *good governance* ini dapat membantu mengatasi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan penelitian ini bisa membuktikan tingkat penerapan konsep *good governance* khususnya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus pada 3 (tiga) Kabupaten di Propinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan responden yang akan diambil adalah pegawai yang ada di Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Panitia Anggaran DPRD.

## Pengukuran Variabel

### a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Partisipasi diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut (Krina 2003):

1. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen di antara aparat.
2. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
3. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
4. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi.
5. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat.
6. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Alat ukur prinsip partisipasi (Krina 2003) adalah: (1) Pendapat masyarakat; (2) Pertemuan kelompok masyarakat; (3) Jajak pendapat umum; (4) Laporan penelitian dan kajian; (5) Media massa; (6) Pemungutan suara sederhana dalam referendum; (7) Diskusi publik; (8) Keikutsertaan secara elektronik; (9) Konferensi kebijakan; (10) *Conference Round Table*

### b. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan mengidentifikasi implementasi indikator-indikator akuntabilitas yang dikembangkan oleh Krina (2003). Adapun indikator-indikator yang dimaksud yaitu:

- a. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan:
  - 1) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
  - 2) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku pada *stakeholders*.
  - 3) Adanya kejelasan dari sasaran anggaran, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
  - 4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
  - 5) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- b. Pada tahap sosialisasi kebijakan:
  - 1) Penyebarluasan informasi mengenai anggaran, melalui media massa, media nirrmasa, maupun media komunikasi personal.
  - 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

- 3) Akses publik pada informasi atas anggaran setelah anggaran dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- 4) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Adapun alat ukur untuk melihat implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada penelitian ini (Krina 2003) yaitu:

- a. Rencana Strategis (Renstra).
- b. *Job description* (acuan pelayanan): pilihan metode pelayanan, mekanisme / standar pelayanan, standar efisiensi.
- c. Produk kebijakan daerah (proses pembuatan keputusan): APBD.
- d. *Annual report* (Laporan pertanggungjawaban).
- e. Kebijakan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.
- f. Penanganan pengaduan: kotak pos pengaduan.
- g. Penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat.
- c. **Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan**

Untuk mengetahui tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan mengidentifikasi implementasi indikator transparansi berikut ini:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggung jawab.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Adapun alat ukur untuk melihat implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan pada penelitian ini (Krina 2003) yaitu:

- a. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi: laporan tahunan, brosur, *leaflet*, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, *website*, papan pengumuman, dan koran lokal.
- b. Informasi yang disajikan: acuan pelayanan publik, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- c. Penangan keluhan: berita-berita kota di media massa dan lokal; *notice of response*; personil; limit waktu respon; tempat saran dan survei tentang isu-isu kebijakan publik; komentar dan catatan untuk draft kebijakan dan peraturan; survei pemakai jasa institusi dan organisasi daerah; Bawasda; Kantor PMD/BPM; Kantor Humas, Dinas Kominfo; Forum lintas pelaku.
- d. Pertemuan masyarakat.
- e. Mimbar rakyat.

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survei, observasi, dan penelitian lapangan.

- a. Survei

Yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari obyek yang diteliti (responden) melalui tanya-jawab. Ada dua cara yang digunakan dalam

metode ini, yaitu kuesioner (pertanyaan tertulis) dan wawancara (pertanyaan lisan). Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara memberikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung (kuesioner diantarkan langsung ke responden yang bersangkutan).

Kuesioner dalam penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dikembangkan oleh Krina (2003). Selanjutnya dilakukan *pilot test* (uji coba) terhadap kuesioner tersebut, yang dilakukan pada sejumlah responden yang sama dengan responden penelitian yang sebenarnya. *Pratest* dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam penyusunan kata-kata, format kuesioner, dan lain-lain yang sangat berpengaruh terhadap validitas penemuan dari penelitian tersebut (Kuncoro 2003).

#### b. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung, yaitu dengan mendatangi aparat yang terlibat dalam penganggaran, yakni Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Panitia Anggaran (Panggar) pada DPRD untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penggunaan teknik observasi langsung ini memungkinkan bagi peneliti mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail.

### Metode Analisis Data

#### Uji Kualitas Data

##### a. Uji validitas

Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan koefisien korelasi *pearson correlation*. Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah *r* hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari *r* tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan 0,05. Jadi, jika koefisien korelasinya lebih besar dari nilai kritisnya maka instrumen pengukur dapat dikatakan valid (Ghozali 2005).

##### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima (Suhartono 2006). Kriteria yang ditetapkan dalam mengetahui reliabilitas data adalah nilai koefisien reliabilitas *alpha* yang lebih besar dari 0,60 (Nunnally 1967 dalam Ghozali 2005). Jadi, jika nilai koefisien reliabilitas *alpha*-nya lebih besar dari 0,60 maka instrumen pengukur dapat dikatakan reliabel (andal).

### Metode Kuantitatif

Untuk menghitung tingkat implementasi partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran menggunakan rumus berikut (Alghifari 2003):

$$\text{Akuntabilitas} = \frac{\text{Tingkat implementasi} \quad \Sigma \text{ Nilai Jawaban "ya"}}{\text{Nilai Maksimum Kuesioner}} \times 100\%$$

Selanjutnya kriteria untuk menentukan keterpenuhan implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan ditentukan dengan

membandingkan nilai z hitung dengan nilai z tabel. Untuk nilai z hitung menurut Richard & Haber (1982) dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$Z = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

Dimana:

p = tingkat keterpenuhan indikator

p<sub>0</sub> = asumsi keterpenuhan indikator (50%)      n = jumlah responden

Sedangkan tingkat konfidensi (α) pada penelitian ini sebesar 5%, maka untuk nilai z tabel = 1,96 (dilihat dari table daerah kurva normal). Selanjutnya dilakukan perbandingan nilai z hitung terhadap z tabel. Menurut Walpole (1995), dalam perbandingan ini nantinya jika nilai z hitung lebih besar dari z tabel maka variabel dinyatakan terpenuhi (tinggi). Sebaliknya, jika nilai z hitung lebih kecil dari z tabel maka variabel dinyatakan belum terpenuhi (rendah).

## ANALISIS DATA

### a. Deskripsi Responden

Jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 eksemplar. Distribusi penyebaran kuesioner dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Distribusi Penyebaran Kuesioner

Instansi yang dituju	Jumlah Kuesioner
Panitia Anggaran DPRD	39
Sekretariat Pemda	51
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	30
<b>Total</b>	<b>120</b>

Sumber: data primer diolah, 2009

Tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini adalah 100% (120 kuesioner). Angka pengembalian yang tinggi ini karena peneliti mengantarkan langsung kuesioner tersebut kepada responden. Namun dari 120 kuesioner yang dikembalikan hanya 98 kuesioner saja yang terisi lengkap, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 98 kuesioner (81,66%).

### b. Uji Kualitas Data

Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Pearson Correlation (r Hitung)	Nilai Kritis (r Tabel)
Partisipasi	0,400** - 0,750**	0,3120
Akuntabilitas	0,321* - 0,804**	
Transparansi	0,462** - 0,944**	

\* signifikan pada level 0,05

\*\* signifikan pada level 0,01

69,53%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan telah terdapat mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban anggaran jika standar tersebut tidak terpenuhi.

Tingkat keterpenuhan indikator akuntabilitas juga dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$\text{Tingkat implementasi Akuntabilitas} = \frac{\Sigma \text{Nilai Jawaban "ya"}}{\text{Nilai Maksimum Kuesioner}} \times 100\%$$

Maka perhitungan untuk masing-masing indikator di atas akan menghasilkan nilai yang sama seperti yang terdapat dalam table 4.4. Jadi rata-rata tingkat keterpenuhan indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

$$\frac{65,81\% + 69,23\% + 51,28\% + 66,67\% + 66,67\% + 64,10\%}{6} = 63,96\%$$

Selanjutnya dilakukan perbandingan nilai z hitung terhadap z tabel. Adapun hasil perhitungan nilai z hitung untuk variabel akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5  
Nilai z Hitung Variabel Akuntabilitas

Indikator	Nilai z Hitung
1	2,079*
2	2,595*
3	0,163
4	2,227*
5	2,227*
6	1,831
<b>Secara Keseluruhan</b>	<b>1,805</b>

Sumber: data primer diolah, 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai z hitung masing-masing indikator untuk variabel akuntabilitas. Jika dibandingkan dengan nilai z tabel (1,96), maka untuk indikator 1, 2, 4 dan 5 nilai z hitungnya lebih besar dari z tabel (2,079; 2,595; 2,227; dan 2,227 lebih besar dari 1,96). Sedangkan untuk indikator 3 dan indikator 6 nilai z hitungnya lebih kecil dari z tabel (0,163 dan 1,831 lebih kecil dari 1,96), dan untuk nilai z hitung pada variabel akuntabilitas secara keseluruhan juga lebih kecil dari z hitungnya (1,805 lebih kecil dari 1,96).

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui untuk indikator 1 (Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar), indikator 2 (Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan), indikator 4 (Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa) dan indikator 5 (Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat serta mekanisme pengaduan masyarakat) telah terpenuhi. Sedangkan untuk indikator 3 (Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas) dan indikator 6 (Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil) belum terpenuhi.

Berdasarkan keterpenuhan di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dinyatakan masih rendah, karena belum semua indikator akuntabilitas terpenuhi. Untuk itu Pemerintah Daerah di Propinsi Bengkulu masih perlu melakukan peningkatan dalam implementasi indikator-indikator akuntabilitas yang belum terpenuhi, terutama untuk indikator 3 (kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas). Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan khususnya dalam penetapan standarisasi biaya untuk setiap item kegiatan yang telah dianggarkan, agar anggaran yang dikelola lebih akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan maupun kepada masyarakat.

#### Variabel Transparansi

Tingkat keterpenuhan indikator untuk variabel transparansi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6  
Tingkat Keterpenuhan Indikator Transparansi

Keterangan	Item pertanyaan	Frekuensi	Persentase
Indikator 1	6	23,17	59,40%
Indikator 2	2	24	61,54%
Indikator 3	2	24	61,54%
Indikator 4	2	21,5	55,13%
<b>Rata-rata keseluruhan</b>		<b>23,17</b>	<b>59,4%</b>

Sumber: data primer diolah, 2009

Jika dilihat dari persentase keterpenuhan indikator transparansi, tingkat keterpenuhan paling rendah terdapat pada indikator 4, yakni 55,13%. Hal ini menunjukkan bahwa keterpenuhan indikator peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan masih belum maksimal. Untuk itu pemerintah daerah di Propinsi Bengkulu perlu melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan arus informasi. Sedangkan tingkat keterpenuhan paling tinggi terdapat pada indikator 2 dan 3, dengan persentase sama (61,54%). Hal ini menunjukkan adanya kemudahan akses informasi dalam pengelolaan keuangan, dan terdapat suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Jika dilihat lebih rinci, terdapat beberapa item yang perlu menjadi perhatian, karena item tersebut tingkat keterpenuhannya lebih rendah dibandingkan item lainnya. Adapun item-item tersebut yaitu untuk pertanyaan 3 pada indikator 1, frekuensi keterpenuhan item tersebut hanya 19 (48,72%), hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi tentang biaya realisasi anggaran melalui media massa masih kurang. Untuk itu pemerintah daerah di Propinsi Bengkulu perlu meningkatkan kerja sama dengan media massa khususnya untuk publikasi tentang biaya realisasi anggaran, agar anggaran yang dikelola tampak lebih transparan sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Selain itu tingkat keterpenuhan indikator transparansi juga dapat dicari dengan persamaan berikut:

$$\text{Tingkat implementasi transparansi} = \frac{\Sigma \text{Nilai Jawaban "ya"}}{\text{Nilai Maksimum Kuesioner}} \times 100\%$$

Maka perhitungan untuk masing-masing indikator di atas akan menghasilkan nilai yang sama dengan yang terdapat dalam table 4.6.

Jadi rata-rata tingkat keterpenuhan indikator transparansi adalah sebagai berikut:

$$\frac{59,40 \% + 61,54 \% + 61,54 \% + 55,13 \%}{4} = 59,40 \%$$

Selanjutnya dilakukan perbandingan nilai z hitung terhadap z tabel. Adapun hasil perhitungan nilai z hitung untuk variabel transparansi dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7  
Nilai z Hitung Variabel Transparansi

Indikator	Nilai z Hitung
1	1,189
2	1,474
3	1,474
4	0,646
Secara Keseluruhan	1,189

Sumber: data primer diolah, 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai z hitung masing-masing indikator untuk variabel transparansi. Jika dibandingkan dengan nilai z tabel (1,96) maka nilai z hitung untuk semua indikator transparansi lebih kecil dari z tabel (1,189; 1,474; 1,474; dan 0,646 lebih kecil dari 1,96). Dan untuk nilai z hitung pada variabel transparansi secara keseluruhan juga lebih kecil dari z hitungnya (1,189 lebih kecil dari 1,96).

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui semua indikator transparansi; indikator 1 (Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab), indikator 2 (Kemudahan akses informasi), indikator 3 (Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap), dan indikator 4 (Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan) belum terpenuhi.

Berdasarkan keterpenuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dinyatakan masih rendah, karena semua indikator transparansi belum terpenuhi. Untuk itu masih perlu melakukan peningkatan dalam implementasi indikator-indikator transparansi, terutama untuk indikator yang paling rendah (indikator 4: peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan). Oleh karena itu pemerintah daerah di Propinsi Bengkulu perlu melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak lain, dalam upaya meningkatkan arus informasi agar anggaran yang dikelola lebih transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## Variabel Partisipasi

Tingkat keterpenuhan indikator untuk variabel partisipasi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8  
Tingkat Keterpenuhan Indikator Partisipasi

Keterangan	Item pertanyaan	Frekuensi	Persentase
Indikator 1	1	42	73,7%
Indikator 2	1	43	75,4%
Indikator 3	2	34	59,65%
Indikator 4	1	37	64,9%
Indikator 5	2	32,5	57%
Indikator 6	8	22	38,6%

Sumber: data primer diolah, 2009

Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa persentase pemenuhan tertinggi ada pada indikator kedua yaitu adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat, dengan persentase 75,4%.

Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen di antara aparat pemenuhannya 73,7%, sedikit lebih rendah dari pemenuhan indikator sebelumnya. Selanjutnya pemenuhan indikator ketiga adalah indikator keempat yaitu fokus pemerintah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi dengan persentase pemenuhannya sebesar 64,9%. Untuk meningkatkan pemenuhan indikator ini, pemerintah daerah harus benar-benar berfokus pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi. Hal ini bisa difasilitasi dengan pembentukan Musrenbang di setiap daerah yang termasuk di dalam kawasan masing-masing kabupaten.

Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan terpenuhi sebesar 59,65% dengan dua item pertanyaan dan masing-masing pertanyaan memperoleh jawaban yang merata dari responden. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi ini dapat dilakukan dengan cara membebaskan masyarakat memberikan masukan-masukan dan menerapkan masukan-masukan tersebut pada proses pengelolaan keuangan.

Indikator kelima terpenuhi 57% menurut responden. Pertanyaan yang mewakili indikator ini berjumlah dua pertanyaan dan jawaban yang diberikan responden untuk kedua pertanyaan ini tersebar merata, 59,6% dan 54,4%. Untuk meningkatkan visi dan pengembangan berdasarkan konsensus antara pemerintah dan masyarakat hendaknya pemerintah bisa meningkatkan fungsi Musrenbang dan lebih melibatkan masyarakat dalam Musrenbang tersebut.

Nilai terkecil ada pada indikator keenam tentang akses masyarakat menyampaikan pendapat dengan frekuensi jawaban "ya" sebesar 22, pemenuhan terhadap indikator ini hanya 38,6%. Berarti, dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Bengkulu Utara akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan masih kurang. Dalam hal ini, pemerintah daerah di Propinsi Bengkulu sebaiknya bisa lebih meningkatkan partisipasi masyarakatnya dengan melakukan diskusi publik atau mengadakan pertemuan kelompok masyarakat agar masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya dan berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan keuangan.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah di 3 Kabupaten dalam Propinsi Bengkulu secara umum masih rendah

## IMPLIKASI

Dari pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah di Propinsi Bengkulu masih perlu melakukan peningkatan implementasi indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penetapan standarisasi biaya untuk setiap item kegiatan yang telah dianggarkan.
- b. Pemerintah daerah di Propinsi Bengkulu juga perlu meningkatkan kerja sama dengan media massa agar anggaran yang dikelola tampak lebih transparan sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- c. Masyarakat diharapkan aktif dalam berpartisipasi dan menilai kinerja pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah, melalui wakil-wakil rakyat di DPRD maupun melalui Lembaga-Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2003). *Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- APKASI, (2006). *Mencari Format dan Konsep Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Disajikan pada seminar "Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Memberdayakan Momentum Reformasi", Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2001.
- BPKD Provinsi DIY, Subbag Data TI. (2008). *Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Yogyakarta*. (Online) (Diakses 12 Maret 2009) tersedia di World Wide Web: <http://bpkd.jogjaprov.go.id/bpkd/images/materilain/petunjukteknis.pdf>.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, Abdul.(2002). *Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Krina, L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. (Online) (Diakses 10 November 2008) Tersedia di World Wide Web: <http://www.goodgovernance.com>.
- Kuncoro, Mudrajat. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Masmudi.(2003). *Laporan Keuangan Sektor Publik Antara Konsep dan Praktek*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Vol.04 no.1 Februari.1-12.
- Pujiyono, (2006). *Good Governance dan Kapitalisme* (Online) (Diakses 14 November 2008) Tersedia di World Wide Web: <http://www.suaramerdeka.com>.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40*.
- Rungun, Richard & Andrey Haber. (1982). *Business Statistics*. Ontario: Richard D. Irwin, Inc.
- Sudi, M. Didih. (2007). *Transparansi dan Partisipasi Lebak* (Online) (Diakses 10 November 2008) tersedia di World Widw Web: <http://www.transparansi.org>.
- Suhartono, Ehrmann & Mochammad Solichin.(2006). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Walpole, Ronald.(1995). *Pengantar Statistika Edisi-3*. Jakarta: PT Gramedia.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir.(2007). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.